



Penguatan Tata Kelola Desa untuk Mendorong Pembangunan Efektif di Kubang Jaya

Budiman Basarah^{*1}, Dwi Haryono², Rini Yanti³, Isma Dewita⁴, Iqra Lugan Sakrora⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

*e-mail budiman_basarah@usti.ac.id¹

Abstract

Good village governance is a fundamental prerequisite for achieving effective and sustainable rural development. Kubang Jaya Village, located in Kampar Regency, faces challenges related to resource management, transparency, and accountability in village administration. This community service program aimed to strengthen the capacity of village officials through the dissemination of relevant legal frameworks, management training, and the utilization of digital technology in village administration. The methods employed included interactive lectures, training sessions, technology application simulations, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results indicate a significant increase in participants' understanding of good village governance principles, from an initial level of 74.71% to 99.41% after the program. Moreover, the activities enhanced participants' awareness of community participation, transparency implementation, and the use of technology to support village development. This program has proven effective in improving the capacity of village officials and the community, thereby laying the foundation for participatory, transparent, and sustainable village development.

Keywords: Village Governance, Dissemination, Effective Development, Digital Technology, Community Participation

Abstrak

Tata kelola desa yang baik merupakan prasyarat tercapainya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi regulasi terkait pemerintahan desa, pelatihan manajemen pembangunan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, pelatihan, simulasi aplikasi teknologi, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip tata kelola desa yang baik, dari tingkat awal 74,71% menjadi 99,41% setelah pelatihan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran pentingnya partisipasi masyarakat, penerapan transparansi, dan penggunaan teknologi dalam mendukung pembangunan desa. Kegiatan pengabdian ini terbukti efektif dalam membangun kapasitas aparatur dan masyarakat desa sebagai fondasi untuk mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola Desa, Sosialisasi, Pembangunan Efektif, Teknologi Digital, Partisipasi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terendah yang memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai entitas sosial, ekonomi, dan politik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, desa berperan



strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri, serta mengelola sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lestari, 2024). Kebijakan tersebut diikuti dengan pengalokasian Dana Desa yang semakin besar setiap tahunnya, sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 2024). Namun demikian, peningkatan alokasi dana ini belum selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan dan tata kelola yang memadai di tingkat desa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sering kali belum terwujud secara optimal, terutama akibat rendahnya kompetensi aparatur desa dalam aspek manajemen dan pengelolaan keuangan publik (Ratnasari & Rahmawati, 2024); S(Setiawan et al., 2023). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI, 2023), sekitar 60 persen desa di Indonesia masih menghadapi kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas penggunaan Dana Desa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Fenomena yang serupa juga ditemukan di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar (Kampar, 2024), tingkat literasi digital aparatur desa masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 45 persen. Rendahnya tingkat literasi ini menjadi hambatan utama dalam upaya digitalisasi tata kelola pemerintahan desa. Aparatur desa cenderung masih menggunakan metode manual dalam pencatatan keuangan, pelaporan, dan penyimpanan dokumen administrasi. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berjalan lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan administratif. Selain itu, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*) belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan desa belum benar-benar mencerminkan aspirasi warga (Pratama & Widodo, 2022); (Lestari, 2024). Permasalahan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi keharusan mendesak, tidak hanya dalam bidang administrasi dan keuangan, tetapi juga dalam aspek literasi digital dan pemahaman hukum pemerintahan desa.

Program SINTESA (Sosialisasi Tata Kelola Desa Guna Mewujudkan Pembangunan yang Efektif) hadir sebagai respon terhadap permasalahan tersebut. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian di bidang Optimization dan Computational Intelligence, di mana hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan model pengambilan keputusan berbasis data dan sistem cerdas mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya pada pemerintahan lokal ((Yanti & Efendi, 2023). Kegiatan SINTESA bertujuan untuk mengimplementasikan



hasil penelitian tersebut ke dalam konteks nyata, yakni melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pendekatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah desa dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan berbasis komunitas.

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur Desa Kubang Jaya yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan staf administrasi, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil wawancara awal, mayoritas aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan menengah, dan sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan digital atau sistem informasi desa. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan internal dan keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa. Selain aparatur, kegiatan ini juga melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan kader pemberdayaan masyarakat desa agar proses pembelajaran bersifat partisipatif. Melalui pelibatan aktif berbagai unsur masyarakat, diharapkan kegiatan ini mampu memperkuat pola komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warganya dalam perencanaan pembangunan desa.

Secara teoretis, kegiatan ini berlandaskan pada pendekatan *community engagement* dan *community development* yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan pemberdayaan. Menurut Bringle dan Hatcher (Bringle & Hatcher, 2020), *community engagement* adalah proses kemitraan antara institusi pendidikan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Dalam konteks kegiatan SINTESA, keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat desa dilakukan dalam bentuk pelatihan bersama, transfer pengetahuan, serta pendampingan dalam menerapkan prinsip *good village governance*. Sementara itu, Chambers (Chambers, 2017) menyatakan bahwa *community development* bertujuan menciptakan masyarakat yang berdaya melalui peningkatan kapasitas, kesadaran kritis, dan kemandirian kolektif. Prinsip ini relevan dalam konteks desa, di mana masyarakat diharapkan menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan.

Selain dua teori tersebut, kegiatan ini juga mengacu pada prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh World Bank (Bank, 2018), yaitu tata kelola pemerintahan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks desa, prinsip ini diadaptasi menjadi *good village governance*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan desa terhadap masyarakat (Hidayat & Ramdhani, 2020). Penegakan prinsip ini sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi dan mengelola sumber daya secara efisien serta keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Di era digital saat ini, literasi digital juga menjadi dimensi penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Van Dijk (Van Dijk, 2021) menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam mengelola informasi dan berkomunikasi secara efektif di ruang publik. Dalam hal ini, aparatur desa perlu memiliki kemampuan mengelola data digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat akuntabilitas publik (Informatika & Center, 2023).



Sejumlah penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa membawa dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi tata kelola. Abdurokhim et al. (Abdurokhim et al., 2023) menemukan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Desa Karangsari meningkatkan efektivitas layanan dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Choirun, Handika, Hariadi, dan Helilintar (Choirun et al., 2022) menambahkan bahwa penerapan sistem informasi desa berbasis smart village mampu meningkatkan transparansi dan mempercepat pelaporan keuangan desa. Namun demikian, penelitian Lestari (Lestari, 2024) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan smart village di Indonesia sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pelatihan terpadu seperti Program SINTESA menjadi kunci keberhasilan implementasi transformasi digital di tingkat desa.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi Desa Kubang Jaya dan telaah teoretis yang telah dikemukakan, kegiatan ini berangkat dari permasalahan utama yang berkaitan dengan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efisiensi administrasi dan akuntabilitas publik. Permasalahan ini mendorong perlunya pendekatan integratif yang memadukan aspek hukum, manajerial, dan teknologi agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Kubang Jaya dalam menerapkan prinsip good village governance melalui pelatihan dan sosialisasi berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi digital aparatur desa agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi keuangan dan pelayanan publik. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Lebih jauh, kegiatan SINTESA menjadi sarana penerapan hasil penelitian di bidang Optimization dan Computational Intelligence untuk menciptakan sistem pengambilan keputusan yang lebih efisien dan terukur di tingkat pemerintahan desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada akhirnya diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, penguatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui sinergi antara pendekatan ilmiah dan praktik lapangan, kegiatan SINTESA menjadi model community engagement berbasis riset yang berpotensi direplikasi di desa lain, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya pada tujuan ke-16, yaitu penguatan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan pemerintahan.



2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan tata kelola desa serta mencapai tujuan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat Desa Kubang Jaya. Pendekatan pelaksanaan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, (3) pendampingan serta monitoring dan evaluasi, dan (4) pelaporan serta tindak lanjut.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi intensif dengan mitra pengabdian, yaitu Pemerintah Desa Kubang Jaya. Kegiatan persiapan mencakup survei lokasi, identifikasi kebutuhan aparatur desa dan masyarakat, serta penyusunan materi sosialisasi yang meliputi regulasi tata kelola desa, prinsip manajemen pembangunan, dan penerapan teknologi digital. Mitra berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan aktual di desa, seperti rendahnya literasi hukum, kurang optimalnya perencanaan pembangunan, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi.

b. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Tahapan ini dilaksanakan melalui ceramah interaktif, untuk menyampaikan materi pokok terkait peraturan perundang-undangan desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta strategi manajemen pembangunan; diskusi dan tanya jawab, untuk menggali pengalaman lokal peserta dan menyesuaikan materi dengan konteks desa; pelatihan penggunaan teknologi digital, berupa simulasi aplikasi sederhana untuk transparansi laporan keuangan desa dan layanan publik berbasis teknologi; mitra berperan sebagai fasilitator lokal, mengundang peserta, menyediakan tempat, dan memastikan kehadiran aparatur serta masyarakat.

c. Tahap Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan pasca-sosialisasi untuk memastikan implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam praktik sehari-hari. Evaluasi dilaksanakan dengan alat ukur kuantitatif melalui pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi tata kelola desa.

d. Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi dianalisis untuk menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola desa. Tim pengabdian bersama mitra merencanakan kegiatan lanjutan untuk memperkuat praktik transparansi dan digitalisasi layanan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul "Sosialisasi Tata Kelola Desa Guna Mewujudkan Pembangunan yang Efektif di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar (SINTESA)" telah dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, pendampingan dan evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjut. Kegiatan ini melibatkan aparatur desa, masyarakat desa, serta tim dosen lintas bidang keilmuan dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada 16 Juli 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang, yang terdiri atas perangkat desa dan masyarakat perempuan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

a. Tingkat Partisipasi dan Profil Peserta

Peserta kegiatan didominasi oleh perempuan (100%) dengan rentang usia 20–35 tahun dan di atas 50 tahun. Mayoritas peserta memiliki latar belakang pendidikan SMA (81,25%), sementara sisanya berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi (12,5%) dan pendidikan vokasi (6,25%). Dari segi pekerjaan, 93,8% peserta adalah ibu rumah tangga, sedangkan 6,3% bekerja sebagai petani. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan telah menjangkau kelompok masyarakat yang strategis dalam mendukung tata kelola desa, khususnya perempuan sebagai penggerak kegiatan sosial di tingkat lokal. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut.



Gambar 1. Penyampaian sosialisasi dan pelatihan oleh tim pengabdian
Source: Dokumentasi pribadi (2005)



Gambar 2. Foto bersama tim pengabdian, peserta dan perangkat desa
Source: Dokumentasi pribadi (2025)

b. Hasil Sosialisasi dan Pelatihan

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan meliputi tiga materi utama, yaitu:

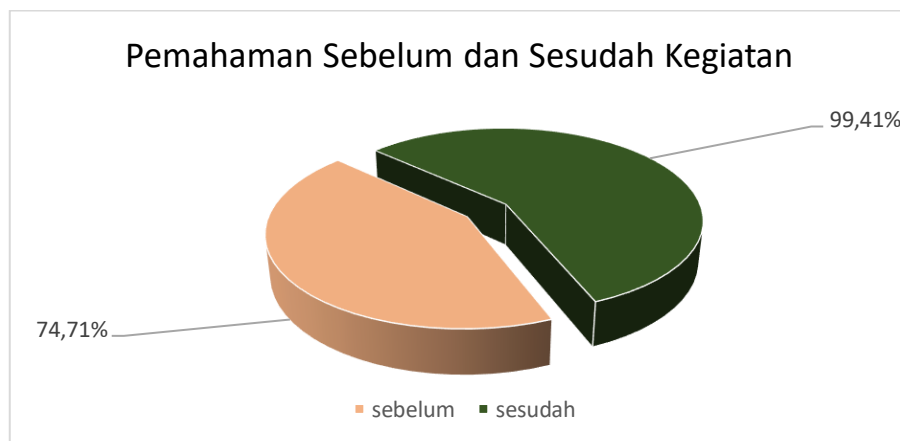
1. Pemahaman regulasi pemerintahan desa dan prinsip good governance;
2. Manajemen perencanaan dan pengawasan pembangunan desa;
3. Penggunaan teknologi digital dalam mendukung transparansi dan layanan publik desa.

Kegiatan diawali dengan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap tata kelola desa. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif dan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi sederhana berbasis teknologi untuk administrasi dan transparansi keuangan desa. Pada akhir kegiatan, peserta mengerjakan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Daftar pertanyaan dalam pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Indikator pemahaman dan keberhasilan kegiatan PkM

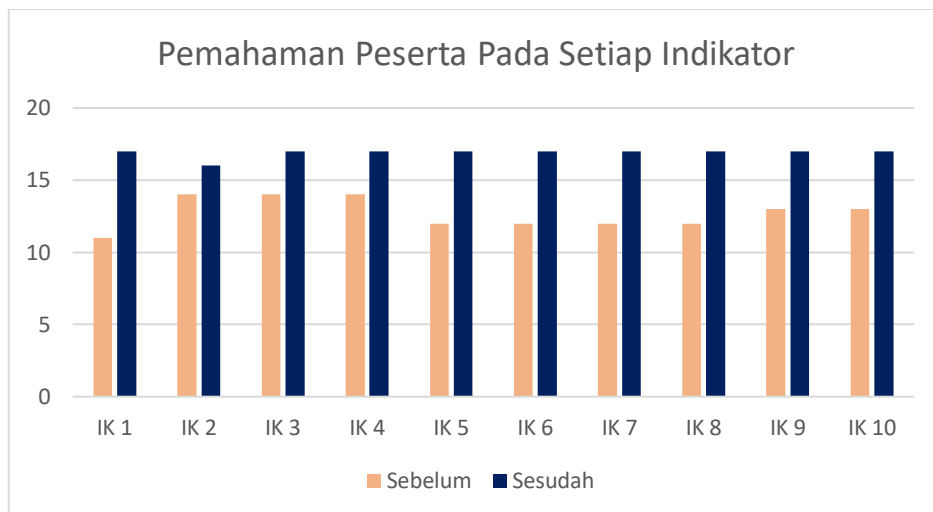
No.	Pernyataan (Indikator)	Tidak Setuju	Setuju
1	Saya memahami peran masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.	☐	☐
2	Saya mengetahui bahwa ada aturan hukum yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah desa.	☐	☐
3	Saya merasa penting untuk mengikuti musyawarah desa sebagai bagian dari warga negara.	☐	☐
4	Saya mengetahui prosedur pelaporan jika ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.	☐	☐
5	Saya yakin sinergi antara hukum dan masyarakat dapat menciptakan desa yang lebih tertib dan adil.	☐	☐
6	Saya memahami pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan desa	☐	☐
7	Perangkat desa wajib melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan desa	☐	☐
8	Inovasi dan teknologi dapat membantu kerja cerdas di desa	☐	☐
9	Saya merasa program desa selama ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien	☐	☐
10	Desa sebaiknya menggunakan sistem digital untuk mendukung transparansi	☐	☐

Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan signifikan: nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 74,71% sebelum kegiatan menjadi 99,41% sesudah kegiatan yang ditunjukkan oleh Gambar 3.



Gambar 3. Peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan
Source: Hasil olah data (2025)

Seluruh peserta mencapai skor maksimal pada sepuluh indikator pemahaman yang diukur, antara lain pemahaman terhadap peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, kesadaran hukum, pentingnya transparansi, dan penggunaan teknologi digital untuk mendukung tata kelola desa yang ditunjukkan oleh Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Pemahaman peserta pada setiap indikator
Source: Hasil olah data (2025)

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Pemerintah Desa Kubang Jaya kini memiliki kerangka kerja yang lebih jelas dalam tata kelola, mulai dari regulasi hingga teknologi. Hal ini merupakan nilai tambah institusional yang dapat memperkuat kinerja pemerintahan desa dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa. Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada integrasi tiga pendekatan strategis—hukum, manajemen, dan teknologi digital—dalam satu model sosialisasi dan pelatihan yang aplikatif. Program ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong transformasi praktik tata kelola melalui penerapan teknologi digital sederhana dalam sistem administrasi dan transparansi desa. Keberhasilan kegiatan tercermin dari peningkatan signifikan pemahaman peserta, perubahan sikap terhadap prinsip partisipasi dan transparansi, serta komitmen pemerintah desa untuk mengimplementasikan praktik tata kelola yang lebih terbuka dan efisien. Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan akses terhadap informasi pembangunan desa, penguatan peran perempuan dalam proses perencanaan, serta peningkatan akuntabilitas publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara teoretis, kegiatan ini memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip good governance di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif lintas disiplin. Pengalaman empiris ini menunjukkan bahwa kombinasi sosialisasi hukum,



pelatihan manajerial, dan digitalisasi layanan publik dapat menjadi model efektif untuk memperkuat tata kelola desa secara partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Namun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan pada jumlah peserta dan cakupan kelompok sasaran yang masih terbatas, khususnya keterlibatan laki-laki dan generasi muda. Oleh karena itu, direkomendasikan agar kegiatan serupa dikembangkan dalam skala lebih luas, dilengkapi dengan pendampingan jangka panjang dan evaluasi periodik, sehingga perubahan sosial, kelembagaan, dan ekonomi yang dihasilkan dapat semakin mendalam dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM USTI atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Masyarakat No. 012/C-01/USTI/2025 Tgl. 3 Februari 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhim, A., Sudrajat, A., Viani, E., Anggraeni, A., & Dewi, A. (2023). Transformasi Digital di Desa Karang Sari: Solusi untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Ekonomi Lokal. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(2), 102–115.
- Bank, W. (2018). *Governance and the Law: World Development Report 2017*. World Bank Publications.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (2020). *Advancing Civic Engagement in Higher Education*. Jossey-Bass.
- Chambers, R. (2017). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Choirun, N., Handika, R., Hariadi, A., & Helilintar, R. (2022). Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Konsep Smart Village. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi*, 7(1), 145–153.
- Hidayat, T., & Ramdhani, M. (2020). Village governance dan akuntabilitas publik di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 6(2), 78–91.
- Informatika, K. K., & Center, K. I. (2023). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2022*.
- Kampar, B. P. S. K. (2024). *Berita Resmi Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. R. I. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024*.
- Lestari, A. (2024). Tren Penelitian Smart Village di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(1), 34–48.
- Pratama, Y., & Widodo, B. (2022). Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kampar. *Jurnal Administrasi Publik Daerah*, 8(3), 201–215.
- Ratnasari, F., & Rahmawati, R. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 12–25.
- Setiawan, A., Nuraeni, D., & Kusuma, T. (2023). Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Innovative*, 5(4), 331–342.



- Van Dijk, J. (2021). *The Digital Divide*. Polity Press.
- Yanti, R., & Efendi, S. (2023). Integrasi Optimization dan Computational Intelligence dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Sistem Cerdas*, 5(2), 89–101.